



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#namapenggugat, tempat/tanggal lahir, Kampung Parang, 08 Juni 1981 (usia 39) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, disebut **Penggugat**.

M e l a w a n

#namatergugat, tempat/tanggal lahir, Romanglompoa, 12 Februari 1990 (usia 30 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gowa, selanjutnya di sebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sgm pada tanggal 29 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2020

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 187/17/XI/2019, tanggal 26 Januari 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Romanglompoo, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah ekonomi kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Februari 2020, Penggugat dengan Tergugat kembali kembali bertengkar di karenakan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat marah-marah dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak menyukai/mencintai Penggugat lagi serta saat itu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Sgm



10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #namatergugat terhadap Penggugat #namapenggugat;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/17/XI/2019, tanggal 26 November 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- 1) **#namasaksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan IRT, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Romanglompoo, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi ketahui jika antara Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Februari 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarganya untuk kembali rukun namun tidak berhasil;
- 2) **#namasaksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IRT, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, Saksi mengaku sebagai saudari kandung Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Romanglompoo, Kabupaten Gowa;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi ketahui jika antara Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Februari 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarganya untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Sgm



hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat, dan juga Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas kepergian Tergugat tersebut, keluarga Penggugat sudah berkali-kali membujuk Tergugat agar kembali rukun bersama dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: #namasaksi dan #namasaksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 November 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan membina rumah tangga, dan keduanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran sejak bulan Januari 2020 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menunjukkan kebenciannya terhadap Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Sgm



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan Penggugat telah diupayakan untuk kembali bersabar dan rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti meninggalkan Penggugat selama 11 bulan, alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Sgm



وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلَقًا.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);
- 4) Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah oleh **Drs.H.Muhtar,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H.** dan **Mawir,S.H.I.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj.Nurwafiah Razak,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mawir, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Nurwafiah Razak,S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 450.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 570.000,00
- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)